Perlukah Kesenjangan Dalam Politik Anggaran?

Frets A. Goraph

Abstrak

Kesenjangan dalam politik anggaran diharapkan dapat memberikan keadilan bagi kebaikan bersama. Politik anggaran jika dilaksanakan dengan baik oleh aktor politik dengan asumsi bahwa jika aktor dalam politik anggaran benar-benar menggunakan hak politik mereka maka kesenjangan politik anggaran bisa tercapai dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini ingin mengungkap bagaimana kesenjangan dalam politik anggaran. Penelitian ini dirancang dengan jenis penelitian kualitatif. Untuk memperoleh data penelitian melalui teknik penentuan informan penelitian yang memahami permasalahan tersebut. Metode pengumpulan data dengan dua cara melalui wawancara mendalam dan kajian dokumentasi. Dinamika politik anggaran yang terjadi pada saat pembahasan pagu anggaran menjadi masalah karena kedua aktor politik antara legislative dan eksekutif mempunyai kepentingan pribadi maupun kelompok. Anggaran menjadi sensitive, itu sebabnya kepentingan aktor menjadi dominan di atas kepentingan publik. Potensi tercapainya kesenjangan dalam politik anggaran ketika kesadaran antar aktor politik bisa memberikan ruang politik redistribusi dan politik pengakuan dalam politik anggaran, sehingga hak-hak politik anggaran masyarakat di atas segalanya.

Kata Kunci: Kesenjangan, Politik Anggaran, Politik Redistribusi, dan Politik Pengakuan.

Pendahuluan

Pembicaraan mengenai masalah anggaran dihubungkan dengan kajian politik memang masih sangat kurang dibahas oleh pakar yang membidangi kajian anggaran serta terlibat langsung dalam proses politik anggaran. Anggaran merupakan inti dari mengelola manajemen pemerintahan telah mengalami banyak masalah yang berkaitan dengan proses politik penentuan anggaran publik. Banyak kasus dalam manajemen anggaran public seperti di Indonesia, anggaran masih dipahami sebagai aturan formal dan aturan-aturan tersebut hanya bersifat formalitas yang berlaku dalam mengelola anggaran public. Sehingga bisa terbaca jelas bagaimana anggaran dirampok oleh elit-elit politik yang menguntungkan kepentingan pribadi dan kelompok.

Anggaran pada hakikatnya mampu memberikan jaminan sosial kepada public karena anggaran tersebut adalah sesuatu yang dibutuhkan publik. Dinamika proses penentuan anggaran baik ditingkat pusat sampai pada tingkat lokal, fakta berbicara di lapangan bahwa pihak elit-elit yang terlibat dalam proses politik anggaran, yang terjadi adalah bagaimana elit politik melakukan tawar-menawar besaran anggaran tersebut milik siapa dan kepada siapa

anggaran tersebut. Lebih para lagi anggaran publik disunat serta direkayasa untuk mengisi pundi-pundi mereka.

Rekayasa anggaran telah menjadi makanan sehari-hari dalam mengelolah manajemen anggaran publik baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan tidak lama lagi pemerintah desa pun ikut-ikutan menikmati anggaran public yang begitu besar, pasca ditetapkan undang-undang desa. Sekiranya optimisme itu muncul ketika terbangunnya system politik demokrasi dalam penentuan alokasi anggaran publik. Artinya proses politik anggaran baik di pusat ataupun di daerah akan memberikan ruang kepada public untuk lebih melihat secara jelas bagaimana dinamika politik anggaran yang demokratis. Transparansi, akuntabilitas menjadi harga mati dalam proses politik anggaran.

Pada umumnya politik anggaran dianggap sebagai domain pemerintah sehingga terkadang di era demokrasi pun, partisipasi public dianggap ancaman oleh pemerintah pusat dan daerah. Cara-cara mengebiri anggaran public dalam proses politik anggaran oleh elit politik merupakan penghianatan kepada rakyat. Kemudian dibangun dalil bahwa partisipasi rakyat tersebut telah direpresentasikan melalui Dewan Perwakilan Rakyat serta elit politik/eksekutif, jadi tidak perlu adanya keterlibatan public secara langsung dalam proses penentuan anggaran. Dalil dan penyimpangan yang terjadi seperti ini akibat dari politik anggaran yang tidak tertata secara demokratis, maka pentingnya memperhatikan elemen-elemen formulasi politik baru dalam rangka menentukan alokasi anggaran public.

Relasi kekuasaan yang telah terbangun secara demokratis ini, diharapkan dapat diatur kembali dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi di atas segalanya agar kesejahteraan rakyat menjadi utama demi mencapai kebaikan bersama dalam sebuah Negara. Idealnya sebuah anggaran harus besifat desentralisasi fiskal yang transparan, akuntabilitas baik untuk mengatur alokasi belanja pengadaan barang dan jasa public, yang semuanya itu harus diatur secara benar. Jangan sampai tujuan penganggaran barang dan jasa public itu terkesan mubasir oleh karena hanya tertulis di atas dokumen kebijakan anggaran seperti APBN dan APBD.

Tinjauan Pustaka

secara umum, anggaran diartikan sebagai rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan suatu institusi atau lembaga tertentu untuk suatu masa periode di masa yang akan datang. Dalam pengertian anggaran secara umum itu, tercakup baik itu pengertian anggaran negara, anggaran perusahaan maupun anggaran institusi atau lembaga lainnya. Anggaran negara adalah suatu pernyataan tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi dalam suatu periode di masa datang, serta data dari pengeluaran dan penerimaan yang sesungguhnya terjadi di masa lalu.

Dalam pengertian yang sama, anggaran daerah memuat hal kurang lebih sama dalam lingkup daerah. Anggaran merupakan salah satu tahap yang harus dilalui dalam perencanaan keuangan terutama sebagai pedoman dalam mengelola keuangannya. Tetapi karena proses penyusunan dan pertanggungjawaban anggaran tidak mungkin bisa dipisahkan dari keterlibatan lembaga perwakilan rakyat. Dengan demikian sesungguhnya anggaran dapat pula berfungsi sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap pemerintah, sekaligus celah bagi terjadinya tarik ulur kepentingan di antara stake holder tersebut.

Menurut Aaron Wildavsky dan Naomi Caiden (2004) dalam hal ini terdapat tiga mistifikasi terhadap anggaran. Pertama, anggaran adalah persoalan rumit dan rewel. Untuk memahaminya, seseorang harus memiliki kecakapan dan tingkat pendidikan tertentu, karena anggaran memiliki struktur, sistem dan mekanisme yang biasanya hanya dimengerti oleh mereka dengan kecakapan khusus. Dan efek negatifnya adalah akses terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan anggaran tidak dimiliki setiap orang.

Dalam banyak kasus terutama di Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, anggaran masih dipahami sebagai aturan formal dan sesuatu yang menguntungkan pihak aktor dan institusi kelembagaan negara dan secara yuridis anggaran sekedar dipahami sebagai aturan baku yang sudah ada. Kedua, anggaran hanyalah urusan proyek-proyek pembangunan dan sumber finansial lainnya. Ujung-ujungnya pada keengganan pemerintah untuk keluar dari kungkungan cengkaman indikator yang mengaburkan implikasi pada kelompok masyarakat

yang rentan. Kaum miskin menjadi dan warga rentan justru menjadi pemikul beban dari implikasi anggaran. Ketiga, anggaran adalah semata-mata urusan yang boleh dimonopoli pemerintah. Setidaknya sejak merdeka hingga saat ini pemerintah selalu mendudukkan anggaran sebagai persoalan yang sangat eksklusif di wilayah monopoli mereka, tanpa ada ruang keterlibatan bagi masyarakat.

Masalah anggaran pada dasarnya adalah masalah kajian ekonomi politik, karena ekonomi politik sebagai suah pendekatan dalam ilmu-ilmu sosial yang bersifat supradisiplin (*supradisciplinary approach*) atau melampaui batas-batas disiplin. Fokus analisisnya adalah pada setiap isu atau kebijakan, yang langsung ataupun tak langsung yang melibatkan kepentingan publik (Uphoff dan Ilcham, 1972). Sehingga sudah barang tentu tergantung pada ruang lingkup dan kedalaman analisisnya, ekonomi politik bisa saja membicarakan isu-isu pada tingkat individu, kelompok, ataupun gabungan dari keduanya dan analisis yang dilaksanakan itupun bisa menjangkau pada level mikro maupun makro.

Secara umum pendapat Uphoff dan Ilcham menurut Solicin Abdul Wahab (1999) sangat tepat karena dalam khasanah ilmu-ilmu sosial, ekonomi politik adalah suatu bidang kajian yang untuk sebagian besar perhatiannya dicurahkan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan kebijakan publik. Hal ini juga karena ekonomi politik pada dasarnya menyangkut keputusan politik mengenai kondisi ketersediaan barang-barang atau benda-benda dan jasa yang dibutuhkan manusia. Pendekatan dalam politik anggaran tersebut menjadi analisis tajam bahwa persoalan anggaran harus letakkan pada kepentingan publik, analisa ekonomi dan analisa institusi, sehingga kebijakan anggaran dapat sesuai dengan aspek yang terkait yang dapat menghindarkan dari politik anggaran jangka pendek, ego kekuasaan dan penguasa saja, tetapi berbasis pada publik sebagai hak yang menerimanya.

Pembicaraan mengenai masalah anggaran dihubungkan dengan kajian politik memang masih sangat asing di bahas oleh ilmuan, baik ilmuan politik maupun para sarjana ekonomi yang memang terlibat langsung dalam proses anggaran. Anggaran yang menjadi inti dari

pengelolaan pemerintah telah mengalami banyak masalah terutama berkaitan dengan proses politik dan penentuan anggaran. Konteks politik anggaran akan terkait dengan siapa yang berperan dan kemampuan daerah dalam memberikan jaminan kepada rakyatnya. Namun yang terjadi politik anggaran dipahami dan dijalankan dalam konteks jangka pendek dan menguntungkan pihak-pihak terkait saja. Aturan dalam penentuan program hanya terletak pada level kepentingan masing-masing aktor, sedangkan masyarakat sering terjadi tidak mengetahui proses dan partisipasi dalam menentukan jauh dari proses yang terjadi, bahkan rakyat sendiri tidak mengetahui berapa persen anggaran yang dilimpahkan untuk kesejahterannya.

Dalam proses penentuan anggaran realitas dan fakta di tingkat nasional maupun lokal menunjukkan terdapat tindakan penggebiran rakyat atas haknya. Dimana rakyat menjadi korban dalam penentuan anggaran. Kepentingan elit dan kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu secara otomatis masuk dalam penentuan, perumusan serta pengesahan anggaran. Bahkan sudah menjadi keumuman politik dagang sapi untuk meningkatkan anggaran ataupun bantuan-bantuan lainnya melalui proses politik yang tidak sehat. Aspek kebutuhan pelayanan masyarakat seakan-akan jauh dari target untuk memberikan pelayanan. Lebih-lebih keterlibatan partai politik penguasa yang mengarahkan birokrat juga semakin mengeruhkan suasana untuk mengambil kesempatan bagi kemajuan partainya di masa yang akan datang.

Permasalahan diatas menunjukkan bahwa ranah politik anggaran tidak sekedar target bagi kekuasaan, tetapi yang lebih menguatirkan adalah pemaknaan politik kepentingan pihak-pihak daerah dan pengusaha dalam menyediakan anggaran untuk publik dengan politik perjuangan publik. Upaya yang harus dilakukan adalah membangun paradigma baru anggaran untuk publik dan mekanisme kelembagaan yang sehat dengan analisis ekonomi politik jangka panjang yang menguntungkan publik.

Esensi Politik Anggaran

Dalam memahami persoalan politik, demokrasi dan merekonstruksikan daerah otonomi adalah tergantung pada elite yang berkuasa. Jika elit yang berkuasa memahami rakyatnya, memahami perbedaan, dan memahami kondisi bangsanya maka demokrasi akan menampilkan wujudnya sesuai yang diharapkan. Seperti pendapat Linz dan Stepan (2000) yang menjelaskan bahwa kejatuhan dan kebangkitan demokrasi tidak menelaah variabel-variabel konflik kelas atau kendala ekonomi tetapi dengan mencurahkan perhatian pada perilaku elit atau kepemimpinan. Peran elit politik menjelmakan peran hakikat pemerintah.

Dalam memahami beberapa konsep negara dan daerah, tentu tidak lepas dari teori negara kontemporer yang sangat terkenal yaitu: *Pertama*, bentuk negara kesatuan yang terdiri dari negara kesatuan dengan sistem sentralisasi yaitu pemerintahan pusat menyelenggarakan seluruh urusan kenegaraan, sementara pemerintah daerah merupakan pihak yang dimintai untuk melaksanakan perintah pusat. *Kedua*, Sistem desentralisasi yaitu daerah diberikan kebebasan dan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri secara otonomi (Kansil, 2001).

Sistem keduanya telah dinikmati oleh negeri ini pada era orde baru dan era reformasi. Keduanya memaknai negara sebagai alat kekuasaan dan pendistribusian kekuasaan secara otonomi. Fungsi yang terakhir ini telah dimaknai sebagai keharusan di dalam membangun negara ataupun daerah yang diyakini sebagai alat untuk lebih baik. Maka nilai positif yang dikembangkan bagi demokrasi dan desentralisasi adalah terbangunnya nilai-nilai dari komunitas politik yang dapat berupa kesatuan bangsa (*national unity*), pemerintahan demokratis (*democratic government*), kemandirian sebagai penjelmaan dari otonomi, efisiensi administrasi dan pembangunan sosial ekonomi (Leemans, 1970).

Secara umum, anggaran diartikan sebagai rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan suatu institusi atau lembaga tertentu untuk suatu masa periode di masa yang akan datang. Dalam pengertian anggaran secara umum itu, tercakup baik pengertian anggaran

negara, daerah, anggaran perusahaan maupun anggaran institusi atau lembaga lainnya. Anggaran negara adalah suatu pernyataan tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi dalam suatu periode di masa datang, serta data dari pengeluaran dan penerimaan yang sesungguhnya terjadi di masa lalu. Anggaran merupakan salah satu tahap yang harus dilalui dalam perencanaan keuangan terutama sebagai pedoman dalam mengelola keuangannya. Tetapi karena proses penyusunan dan pertanggungjawaban anggaran tidak mungkin dipisahkan dari keterlibatan lembaga perwakilan rakyat. Dengan demikian sesungguhnya anggaran dapat pula berfungsi sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap pemerintah, sekaligus celah bagi terjadinya tarik ulur kepentingan di antara *stake holder* tersebut.

Sejauh ini terdapat tiga mistifikasi terhadap anggaran. *Pertama*, anggaran adalah persoalan rumit dan rewel. Untuk memahaminya harus memiliki kecakapan dan tingkat pendidikan tertentu. Tidaklah mudah mementahkan anggapan yang mendarah daging itu karena anggaran memiliki struktur, sistem dan mekanisme yang biasanya hanya dimengerti oleh mereka dengan kecakapan khusus. Dalam banyak kasus terutama di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, anggaran masih dipahami sebagai aturan formal dan sesuatu yang menguntungkan pihak aktor atau institusi kelembagaan di daerah dan secara yuridis anggaran sekedar dipahami sebagai aturan baku yang sudah ada. *Kedua*, anggaran hanyalah urusan proyek-proyek pembangunan dan sumber finansial lainnya. Ujung-ujungnya pada keengganan pemerintah untuk keluar dari kungkungan cengkeraman indikator-indikator yang mengaburkan implikasinya pada kelompok masyarakat yang rentan. Kaum miskin dan warga rentan justru menjadi pemikul beban dari implikasi anggaran. *Ketiga*, anggaran adalah semata-mata urusan yang boleh dimonopoli pemerintah. Setidaknya sejak merdeka hingga saat ini pemerintah selalu mendudukan anggaran sebagai persoalan yang sangat eksklusif di wilayah monopoli mereka, tanpa ada ruang keterlibatan bagi masyarakat (Fuady, 2002)

Idealnya, anggaran difungsikan sebagaimana mestinya, yaitu sebagai fungsi kebijakan fiskal dan manajemen. Sebagai instrumen fiskal, anggaran dapat digunakan untuk mengatur alokasi belanja pengadaan barang dan jasa publik (*public goods and services*). Berdasar skala prioritas, pemerintah bisa mengalokasikan nilai-nilai tertentu untuk belanja tertentu. Fungsi fiskal kedua adalah distribusi. Melalui anggaran, pemerintah bisa membuat kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan atau mengurangi kesenjangan, kelas sosial maupun sektoral. Fungsi fiskal ketiga adalah fungsi stabilisasi. Jika terjadi ketidakseimbangan yang ekstrem semisal harga bahan pokok yang tinggi atau sangat rendah sehingga berpotensi merugikan satu lapisan masyarakat, pemerintah bisa melakukan intervensi melalui anggaran. Salah satu unsur yang penting yang harus dipenuhi dalam penentuan anggaran adalah tersedianya ruang yang luas bagi rakyat atas akses seluruh proses sosial, politik dan ekonomi.

Pembahasan

Dilematis Mencapai Kesetaraan dalam Politik Anggaran

Kebijakan anggaran publik jika tidak merefleksikan tuntutan massa, dan hanya nilai-nilai elit yang berlaku. Perubahan-perubahan dalam kebijakan anggaran secara incremental akan memungkinkan tanggapan yang muncul hanya mengancam sistem sosial-ekonomi, etnis, budaya, dan akan terjadi diskriminasi pada kelompok minoritas. Hal tersebut menjadi dilematis dalam perumusan kebijakan anggaran dan sangat sulit untuk dibuktikan. Sehingga dalam banyak kasus yaitu program pembangunan dengan dalil demi peningkatan kesejahteraan. Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa aspek demokrasi dan desentralisasi anggaran dimaknai sebagai proses perjuangan hak-hak rakyat terhadap anggaran publik. Maka tentunya anggaran menjadi sumber konflik antara eksekutif dan legislative baik pusat maupun di daerah-daerah, oleh karena banyaknya kepentingan kelompok, baik itu komisi, fraksi, maupun partai penguasa untuk memenuhi kebutuhan programnya.

Ketika kekuasaan politik pemerintah dijadikan mesin pencari rente maka banyak didominasi oleh kepentingan kelompok mayoritas yang berkeinginan bahwa

institusi/kelompok merekalah yang pantas mendapatkan atau menerima anggaran, atau sebaliknya penentuan anggaran didominasi pemerintah dengan memaksimalkan kekuasaan mereka untuk memonopoli dalam proses penentuan alokasi kebijakan anggaran publik, jika seperti itu, setidaknya telah terjadi diskriminasi alokasi anggaran publik, kemudian yang terjadi adalah justru kebohongan dan pemaksaan yang sebenarnya telah mengingkari nilai-nilai demokrasi pada anggaran publik itu sendiri.

Penyimpangan yang terjadi akibat dari ekonomi politik anggaran, maka diperlukan cara-cara baru dalam merumuskan dan mengelola anggaran agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Cara-cara sepihak, memperjuangkan golongan, institusi sendiri adalah penghianatan terhadap publik. Kedudukan dan domain politik anggaran selalu menjadi perdebatan para pakar politik. Persoalan anggaran dianggap sebagai permasalahan pemerintah, institusi, tata kelola, kekuasaan, ideology serta kebijakan dan pasar maupun persoalan sosial-budaya, ekonomi politik jangka pendek.

Defenisi ruang lingkup dan batasan ekonomi politik anggaran sering dianggap tidak jelas, dan berada di mana saja. Namun umumnya politik anggaran merupakan domain peran negara karena dianggap sebagai analisis kajian ekonomi politik. Sehingga kekuatan politik menjadi factor penting untuk merumuskan dan merencanakan anggaran. Permasalahan besar ekonomi politik anggaran harus dimaknai sebagai alat untuk memperjuangkan hak-hak rakyat bukan mendiskriminasikan rakyat. Dalam hal ini, peran negara berhak untuk merumuskan ulang, peran dan fungsinya bagi kesejahteraan rakyat (Wildavsky dan Caiden, 2004).

Keadilan Anggaran Menurut Wildavsky dan Caiden

Semakin besarnya kesenjangan anggaran publik, maka menurut Wildavsky dan Caiden, (2004), harus ada upaya menemukan formulasi yang tepat dalam penentuan anggaran adalah mengenai keadilan anggaran, yang terkait erat dengan usaha serta peran negara dan pemerintah memberikan jaminan sosial yang tepat bagi rakyat terutama pada lapisan

masyarakat yang rentan. Pola hubungan yang transparan, terukur, serta demokratis antara pemerintah dan masyarakat akan mereduksi rasa curiga manakala negara melalui pemerintah di eksekutif dan dewan di legislative mampu melakukan proses penentuan anggaran dengan baik dan mengutamakan kepentingan rakyat secara nyata yang dapat dirasakan rakyat. Sebagai upaya untuk menemukan formulasi yang tepat mengenai keadilan anggaran, maka ekonomi politik anggaran tentu akan terkait dengan peran negara memberikan jaminan sosial yang tepat bagi rakyat atas dasar kewenangan semestinya. Dengan demikian, pentingnya anggaran harus diperjuangkan sebagai terbangunnya system anggaran yang menggambarkan adanya kesetiaan, keadilan, kesetaraan, partisipasi dan pertanggungjawaban pemerintah dalam peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat.

Demokratisasi anggaran menjadi penting dalam proses penentuan anggaran publik dalam menjamin adanya jaminan sosial yang setara. Pemaknaan demokrasi dalam anggaran tidak dapat dilepas dari demokrasi itu sendiri. Menurut Robert Dahl, demokrasi menyediakan ruang dimana warga negara terlibat dalam berbagai proses politik yang terjadi, sekalipun keterlibatan rakyat dalam proses tersebut hanya pada partisipasi politik untuk menggunakan hak pilih dan hak-hak demokrasi lainnya, tetapi demokrasi modern kalau tidak seluruhnya menganut prinsip perwakilan politik maka fungsi-fungsi formal dari keterlibatan rakyat dalam proses politik diserahkan kepada wakil-wakilnya di parlemen, walaupun suara dan sikap wakil rakyat tidak seluruhnya mencerminkan aspirasi dan keinginan dari rakyatnya.

Kontestasi demokrasi anggaran pada prinsipnya harus menganut asas transparansi, akuntabilitas, pemerataan/keadilan, penegakan hukum dalam demokrasi anggaran. Untuk mencapai keadilan anggaran dimaksud maka sangat penting adanya partisipasi secara langsung dalam proses penentuan anggaran publik, walaupun terdapat dewan di legislative yang menjadi symbol representasi politik. Tingginya partisipasi politik secara langsung akan menjadi satu mesin politik rakyat dalam mengontrol serta terlibat langsung baik itu, dalam proses penentuan anggaran, implementasi kebijakan anggaran, serta sampai pada output atau dampak hasil yang

dirasakan masyarakat sendiri, apakah anggaran bisa memberikan keadilan dan pemerataan secara menyeluruh atau tidak ada manfaatnya sama sekali.

Kedaulatan rakyat harus dipakai dalam memata-matai proses politik anggaran oleh eksekutif maupun legislative, supaya keadilan anggaran bisa tercapai sehingga jaminan sosial-ekonomi, politik, etnis-budaya masyarakat dijunjung tinggi untuk terciptanya kesejahteraan rakyat. Demokrasi anggaran yang baik dapat tergambar pada proses perumusan kebijakan publik yang semakin dekat dengan kesejahteraan rakyat. Pemaknaan kebijakan anggaran diyakini sebagai proses penyelamatan/solusi permasalahan rakyat. Tentunya saja, kebijakan yang diambil merupakan kebijakan pilihan berkaitan dengan tujuan keadilan sosial bagi hajat hidup masyarakat.

Politik Pengakuan Dalam Politik Anggaran

Dalam tulisan artikel ini pula, penulis menggunakan kerangka analisis berdasarkan proposisi Nancy Flazer tentang inklusi sosial dan politik yang menekankan pada keadilan budaya berkaitan dengan (politik pengakuan) dan keadilan ekonomi berkaitan dengan (politik redistribusi). Dari instrumen kedua proposisi di atas maka muncul pertanyaannya adalah bagaimana kesetaraan dapat tercapai dalam sebuah proses politik anggaran yang di dalamnya terdapat kepentingan kelompok mayoritas dan minoritas?. Coba kita mereview permasalahan dinamika proses politik anggaran yang dilakukan oleh pemerintah baik itu pusat maupun daerah yaitu eksekutif dan legislatif. Yang kita bisa temukan adalah tawar-menawar besaran anggaran kepada siapa atau kementerian/dinas mana yang anggarannya lebih banyak menyedot anggaran untuk kepentingan siapa yang akan diuntungkan. Misalkan saja dalam proses pembahasan politik APBN maupun APBD oleh eksekutif dan legislatif, terkadang anggaran diboikot oleh komisi, fraksi, partai penguasa ataupun partai di luar koalisi menolak platform anggaran karena mungkin terkesan tidak memihak kepada kepentingan publik, sehingga proses politik anggaran pun terkadang divoting untuk menyetujui anggaran tersebut.

Dinamika dalam proses politik anggaran seperti ini pun telah menggambarkan ketidak-adilan kepada kelompok sosial minoritas yang ingin memperjuangkan alokasi kebijakan anggaran pro-public. Dalam kebijakan politik anggaran yang demokratis pun terkadang alokasi anggaran terlihat terkotak-kotak artinya, anggaran ini kepada siapa, kelompoknya siapa, dimana, lembaga yang mana, semuanya itu dipertontonkan secara terang-terangan kepada public tanpa rasa malu, seperti kasus dianggarkannya dalam APBN terkait biaya ganti rugi korban lumpur lapindo. Artinya apa bahwa kebijakan politik anggaran seperti itu telah menciptakan ketidak-adilan pada sebuah kebijakan anggaran, jikalau pemerintah mencermati dengan baik, alias melihat permasalahan tidak menggunakan kaca mata kuda tentunya, masih sangat banyak masalah pengangguran, kemiskinan, ketidak-adilan, *law inforcement*, pendidikan dll.

kebijakan politik anggaran bukan hanya persoalan kelompok mayoritas dan minoritas yaitu elit-elit politik yang berada di parlemen, tetapi kebijakan politik anggaran haruslah lebih bersifat komprehensif. Hampir di seluruh institusi pemerintah kebijakan politik anggaran mencerminkan anggaran mayoritas dan minoritas yang pada akhirnya hal ini akan menciptakan ketidak-adilan budaya/pengakuan dalam alokasi penentuan anggaran sehingga, terjadi degradasi politik pengakuan terhadap penentuan anggaran kepada kaum minoritas akan menyebabkan kaum minoritas merasa tidak berkepentingan lagi dengan anggaran tersebut, seharusnya kelompok minoritas dalam parlemen mendapat hak-hak yang setara dalam alokasi anggaran.

Politik Redistribusi Dalam Politik Anggaran

Sebenarnya proses politik anggaran juga diyakini dapat memberikan rasa keadilan ekonomi bagi kepentingan public. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana cara mewujudkannya? Pada poin ini yaitu keadilan ekonomi (politik redistribusi) akan menjadi menarik untuk kita bahas. Untuk bisa menganalisis permasalahan maka penting melakukan mapping fenomena dalam hal proses politik anggaran. *Pertama*, seperti pada poin awal terkait keadilan budaya atau

politik pengakuan yang dijelaskan di atas, penulis telah menjelaskan bagaimana dinamika proses politik anggaran, siapa yang terlibat dalam proses politik anggaran, kepada siapa dan untuk apa kebijakan anggaran dibuat. Berangkat dari penjelasan ini, maka dalam politik anggaran yang menjadi kunci penentuan alokasi anggaran, mempunyai peran dan fungsi yang sangat vital dan strategis bagaimana alokasi anggaran public bisa mencapai kesetaraan tanpa adanya tindakan rekayasa serta diskriminasi anggaran bagi kaum minoritas. Di sinilah hadirnya peran negara atau pemerintah mengatur dengan baik sumber-sumber alokasi anggaran secara fair dan merata supaya bisa memberikan jaminan sosial yang tepat kepada rakyatnya yang minoritas.

Pola relasi kekuasaan antara pemerintah dan rakyat dalam proses politik anggaran harus terukur, transparan, akuntabilitas yang baik akan menghilangkan ketidak-percayaan rakyat kepada pemerintah dalam hal ini eksekutif dan legislative yang kemudian diharapkan akan lebih baik. Misalkan saja, stereotip perimbangan bagi hasil pajak pertambangan, kehutanan, perumahan, serta pajak lainnya, yang dikaitkan dengan desentralisasi fiskal diharapkan harus mampu menciptakan rasa adil tanpa adanya perimbangan dan pembagian hasil pajak yang tidak jelas pengelolaannya, mestinya diatur penggunaan anggaran dalam undang-undang secara tegas sehingga tidak adanya aturan yang multi-tafsir.

Dengan demikian pentingnya politik anggaran harus diperjuangkan sebagai bentuk terbangunnya system anggaran yang demokratis yang menggambarkan asas transparansi, akuntabilitas, serta pentingnya partisipasi publik secara langsung, harapannya akan bisa meningkatkan pelayanan publik secara merata. Kebijakan politik anggaran harus melihat pada dimensi moral serta nilai yang patut dipertimbangkan sebagai bentuk menghargai hak-hak individu setiap warga negara untuk menjamin adanya kesetaraan dalam alokasi anggaran publik.

Politik redistribusi anggaran harus dimaknai sebagai sebuah konteks sistem baik itu dimensi politik pengakuan dan politik redistribusi dalam proses politik anggaran. Yang dicari dari proses politik anggaran bukanlah elit mendapatkan anggaran yang lebih besar dengan kelompok mayoritasnya daripada kelompok lainnya, tetapi harusnya politik anggaran mencerminkan asas kesetaraan/keadilan anggaran bagi kebaikan bersama.

Kesimpulan

Terbangunnya sistem politik demokrasi memberikan dampak besar bagi perkembangan suatu negara. Lahirnya demokrasi telah memberikan secerca harapan yang kiranya dapat menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Adanya pemilu dengan harapan, terpilihnya eksekutif dan legislative kiranya mampu menjawab persoalan kemiskinan, ketidak-adilan, ketidak-setaraan, kriminalitas, termasuk juga diskriminasi kebijakan anggaran publik.

Tentunya permasalahan ketidak-kesetaraan/pengakuan terhadap kaum minoritas yang ada di parlemen, dan imbas dari ketidak-adilan alokasi politik anggaran, akan menyebabkan rakyat menderita, oleh karena, elit mayoritas eksekutif dan legislative tidak melihat alokasi anggaran publik adalah bagian dari kehidupan masyarakat untuk menikmati pembangunan serta pendidikan, kesehatan, yang lebih baik. Jika elit politik mayoritas menyadari betul bahwa anggaran publik adalah kebutuhan publik, maka dalam penentuan alokasi anggaran tidak terjadi diskriminasi anggaran terhadap kaum minoritas, siapa yang diuntungkan dan dirugikan.

Dinamika politik anggaran antara eksekutif dan legislative baik dipusat maupun di daerah menjadi penentu terciptanya kesetaraan dan keadilan anggaran publik tanpa mengesampingkan kelompok yang kecil/lemah. Kebijakan politik anggaran yang baik mencerminkan pula pemahaman persepsi eksekutif dan legislative tergambar dalam kebijakan anggaran yang maksimal tanpa berpihak kepada kelompok-kelompok mayoritas maupun minoritas. Sebaliknya persepsi actor yang buruk dalam merumuskan kebijakan anggaran maka yang terjadi adalah ketidak-adilan, ketidak-setaraan anggaran publik dan hanya menguntungkan kaum eksekutif dan legislative mayoritas.

Terciptanya kesetaraan/keadilan anggaran pula seharusnya dalam penentuan kebijakan anggaran oleh eksekutif dan legislative tidak melihat pada, suku/etnis, budaya, status sosial, kelompok-kelompok kepentingan, dan lainnya. Partisipasi publik secara langsung dalam menentukan kebijakan politik anggaran juga menjadi kunci tercapainya kesetaraan/keadilan dalam politik anggaran akan semakin berpihak kepada publik. Maka secara tidak langsung partisipasi publik akan menjadi kekuatan mengontrol arah implementasi kebijakan anggaran publik tepat sasaran atau tidak, dalam menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Dengan begitu kesetaraan anggaran bisa tercapai tanpa ada pihak-pihak yang dirugikan dan diuntungkan. Menjunjung tinggi pengakuan terhadap hak-hak individu seseorang akan bisa mencapai kesetaraan dan keadilan dalam politik anggaran.

Daftar Pustaka

- Anonymous. 2003. *Rekaman Proses : Workshop Partisipasi Masyarakat dalam Anggaran*, 28-29 Juli 2003. IDEA-Yogyakarta.
- Dahl, Robert. 2001. *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi secara singkat*. YOI. Jakarta.
- Flazer, Nancy. "Social Justice In The Age Of Identity Politics ; Redistribution, Recognition, And Participation. Stanford University, April 30-May 2, 1996.
- Flazer, Nancy. 2000. "Redistribution Or Recognition?: A Political-Phylosophical Ekschange". London; Verso.
- Franz Magnis Suseno. 2003, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Geamedia.
- Haryatmoko. 2003. *Etika Politik dan Kekuasaan*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- James A.Caporasa dan David P.Levine, 1992, *Teori-teori Ekonomi Politik*, Cambridge University Press. Diterjemahkan oleh Suraji Penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2009.
- Liz dan Stepen, 2000, *Pilitical Man, The Social Bases of Politics*, New York.
- Drometer Marcus. *Bureaucrats And Short-Term Politics*. C. Springer Science+Business Media. LLC 2010.
- Santoso, Purwo. 2004. *Menjaring Anggaran untuk Rakyat*. Yayasan Tifa-Idea. Yogyakarta
- Wahab, Solichin Abdul. 1999. *Ekonomi Politik Pembangunan*. Bisnis Indonesia era Orde Baru da ditengah krisis moneter. Brawijaya University Press. Malang.
- Wildavsky Aaron dan Caiden Naomi. *Dinamika Proses Politik Anggaran*. Penyadur; Suraji, Sufiansyah-Yogyakarta :Matepena Consultindo, 2012.